

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana desa memiliki keterkaitan dengan perkembangan pemerintahan desa serta kemasyarakatan desa. Apabila dalam proses pengelolaan dana desa dilakukan secara tidak efektif, maka perkembangan pemerintah desa akan terhambat. Masyarakat saat ini turut merasakan adanya ketidaksesuaian antara dana desa yang didapatkan dengan kinerja yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang maksimalnya pembangunan di desa, serta masih adanya fasilitas bagi masyarakat yang kurang memadai seperti penerangan jalan. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menginformasikan bahwa dari tahun ke tahun tindak korupsi dana desa mengalami peningkatan. Dana desa yang dikorupsi oleh kepala desa dan aparat desa hingga tahun 2018 mencapai Rp 40,6 miliar (Kompas.com).

Dana desa mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, dapat dilihat dari tahun 2015-2017 mencapai Rp 122,09 triliun, dan terdapat peningkatan di tahun 2018 menjadi Rp 149,31 triliun (kemenkeu.go.id). Adanya peningkatan tersebut apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik akan menjadi salah satu faktor pemicu tindak kecurangan dalam pelaporan keuangan baik *fraud* maupun tindak penyelewengan dana. KPK menemukan temuan empat aspek yang memicu terjadinya tindak korupsi, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia (kontan.co.id). Mengingat dana desa yang diterima cukup besar, pemerintah desa perlu menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dalam proses pengelolaan.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat mewujudkan transparansi pada pengelolaan keuangan, selain itu masyarakat dapat melakukan pemantauan atas pengelolaan keuangan dana desa (Triani & Handayani, 2018). Dalam mewujudkan pengelolaan desa yang transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Banyuwangi menciptakan sistem *e-village budgeting*. Sistem ini bertujuan untuk memonitoring pola penganggaran pada setiap pemerintah desa yang ada di Banyuwangi. Secara keseluruhan, sistem *e-village budgeting* akan mengawasi transparansi anggaran, memastikan apakah program pembangunan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran. (Ramadhanny & Yuwono, 2018) mengatakan sistem EVB dapat mengendalikan keuangan dan pembangunan ditingkat desa, sehingga terciptanya sebuah keefektifan bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas penganggaran yang sesuai aturan.

Sistem *e-village budgeting* dapat dikatakan telah menjadi keberhasilan pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam melakukan inovasi sistem berbasis daring yang bertujuan untuk memudahkan perangkat desa dalam proses penganggaran serta dapat mengurangi adanya tindak penyelewengan dana desa. Hal ini terbukti pada tahun 2017 Program *E-Village Budgeting* (EVB) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan Top 40 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Banyuwangikab.go.id). Melalui sistem *e-village budgeting* dapat memudahkan perangkat desa dalam mengelola dan menyajikan laporan penggunaan dana desa, selain itu juga memberi kemudahan kepada masyarakat dalam berpartisipasi dalam mengawal dana desa (Ramadhanny & Yuwono, 2018).

E-village budgeting terdiri atas 3 bagian utama yang penting, yaitu perencanaan, tata kelola, dan evaluasi. Sistem ini telah diterapkan pada 189 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nasution dan Ramadhan (2019) menyatakan

implementasi dari sistem *e-budgeting* berpengaruh dengan transparansi keuangan. Riset tersebut didukung oleh A. P. Nasution dan Atika (2019) yang menyatakan bahwa sistem *e-budgeting* telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwasannya transparansi merupakan salah satu dari tiga prinsip utama dalam pencapaian pemerintahan yang *good governance*. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, sistem *e-village budgeting* dinyatakan telah efektif dan efisien (Anwar dkk., 2019)

Dalam mencapai pemerintah yang *good government*, sebuah sistem akan membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tersebut. Begitu juga penggunaan sistem *e-village budgeting* yang tidak dapat dikatakan mudah dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti jaringan dan partisipasi pengguna (*user*). Perubahan sistem pengelolaan dana desa dari manual menjadi sistem *electronic* tentunya tidak dapat diterima secara langsung oleh pengguna sehingga masih mengalami kesulitan dalam proses pengoperasian, hal tersebut merupakan salah satu penyebab terhambatnya proses pengelolaan (Ramadhanny & Yuwono, 2018). Pada saat ini aparatur desa tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, akan tetapi dituntut pula menguasai sistem informasi (Pratiwi & Ulfah, 2018). Menurut penelitian (Al Mansoori dkk., 2018) faktor manusia memainkan peran penting pada proses penerimaan dan adopsi teknologi. Untuk memudahkan dalam penggunaan sistem *e-village budgeting*, diperlukan pelatihan yang ditujukan kepada aparatur desa yang berpartisipasi dalam pengoperasian pengelolaan dana desa.

Pemerintah kabupaten Banyuwangi telah memberikan pelatihan awal untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut sehingga dapat memudahkan dalam mengoperasikan sistem *e-village budgeting* demi mencapai kebermanfaatannya. Faktor kompetensi pada sumber daya manusia sangat penting dan dibutuhkan pada sistem pengelolaan keuangan

berbasis *electronic*. Mathis dan Jackson (2006), kompetensi adalah hal paling mendasar yang harus dimiliki individu maupun tim agar mencapai peningkatan kinerja. Kompetensi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa indikator penting, termasuk pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*abilities*). Dijelaskan oleh (Satriaajaya dkk., 2017) bahwa sistem pengelolaan keuangan yang telah dirancang sedemikian rupa dengan sangat baik dan tepat, akan tetap bergantung pada sikap penerima dan pengguna (*user*) untuk dapat dikatakan telah mencapai tingkat keberhasilan dalam pengelolaannya.

Kemampuan sumber daya manusia serta perilaku aparatur desa dalam mengoperasikan sistem sangat penting karena mencerminkan kesuksesan dari proses sistem tersebut yang juga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dalam organisasi (Kahfi dkk., 2017). Pernyataan tersebut didukung oleh (Darmawan & Darwanis, 2018) bahwa sumber daya manusia harus dipastikan berkualitas untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan. Perangkat desa yang memiliki tugas dalam pengoperasian sistem, selain dituntut menguasai bidang akuntansi juga diharuskan memahami teknologi. Hal ini bertujuan agar tercapainya keberhasilan dalam penggunaan sistem. Penelitian (Kiranayanti & Erawati, 2016) dengan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengelolaan dana desa yang baik berarti mampu menciptakan keuangan yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Apabila pengelolaan keuangan telah dilakukan secara efektif, maka dapat dikatakan sebagai pemerintahan dengan tata kelola yang baik (Yusniyar & Abdullah, 2016). Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa, Suatu negara yang berhasil mencapai *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasar dari pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap atau responsivitas, berorientasi pada konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Prinsip utama yang berkaitan

erat dengan terciptanya *good government governance*, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Yusniyar dan Abdullah (2016), menuliskan bahwa didalam suatu pemerintahan dibutuhkan peraturan yang mewajibkan seluruh pemerintah daerah agar menyusun LKPD yang sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Hal ini bertujuan agar terciptanya prinsip-prinsip *good governance* yang efektif dan modern, demokratis dan terbuka terhadap masyarakat. Pemerintahan dikatakan berhasil mendapat predikat tata kelola yang baik jika merealisasikan prinsip adil, terbuka dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan (Sriwijayanti, 2019)

1.2. Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Nasution & Ramadhan, 2019) tentang pengaruh implementasi *E-budgeting* terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi *e-budgeting* berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah.

Selanjutnya, penelitian oleh Oktaviani dkk. (2019) tentang E-Budgeting for public finance transparency and accountability. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi *e-budgeting* dilakukan secara online dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi sehingga implementasi transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah telah terwujud. Realisasi transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat dari upaya pemerintah untuk mempublikasikan pelaksanaan proses anggaran dan kegiatan program pemerintah secara keseluruhan. Bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat melalui informasi anggaran yang disediakan dan diterbitkan oleh pemerintah. Pengimplementasian dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur operasi yang telah ditetapkan. jadi, penelitian ini menyatakan bahwa *E-budgeting* berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Berikutnya, penelitian dari Anwar dkk. (2019) dengan judul *Inovation of local village budgeting management: the Case study of Banyuwangi regency electronic village budgeting*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *E-village Budgeting* terbukti efektif dan efisien dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas .

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang bagaimana sistem *e-village budgeting* dapat mempengaruhi pencapaian *good government governance* dengan dimediasi oleh kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang menyatakan bahwa sistem *e-village budgeting* dapat meningkatkan tata kelola yang baik meskipun telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa sistem *e-village budgeting* selalu berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dan transparansi. Pada penelitian sebelumnya pun masih belum ada yang menggunakan variabel pemediasi untuk variabel independen dan dependen, sehingga dalam penelitian ini peneliti menambahkan kompetensi sebagai variabel mediasi. Kompetensi dijadikan sebagai variabel pemediasi dikarenakan kompetensi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Adanya sistem yang diberlakukan dalam desa apakah dapat membentuk sumber daya yang berkompeten dalam bidang tersebut sehingga dapat membantu jalannya proses keberhasilan dalam mencapai tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh sistem *E-Village Budgeting* terhadap terciptanya *Good Government Governance*

2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi sebagai variabel *intervening* dalam hubungan antara sistem *E-Village Budgeting* dan *Good Government Governance*

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibentuk berdasarkan beberapa bab yang terdapat dalam penelitian ini. Hal ini memiliki tujuan untuk memudahkan dalam proses penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab 1 berisi tentang pemaparan fenomena yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, yaitu terbentuknya sistem *e-village budgeting* di daerah kabupaten Banyuwangi untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang setiap tahunnya meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penerapan sistem *e-village budgeting* terhadap terbentuknya pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Selain itu, bab ini juga memaparkan kesenjangan penelitian yang menjadikan motivasi dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana penerapan sistem *e-village budgeting* dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas, serta menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Kemudian hal tersebut yang menjadikan dasar dalam pembentukan kerangka konseptual yang meliputi penjelasan antar variabel serta keterkaitannya. Selanjutnya pada bab ini akan membahas tentang teori yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori perilaku

(*behavioral theory*) yang digunakan dalam proses penggunaan sistem informasi, yaitu *Theory Technology Acceptance Model (TAM)*

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, termasuk identifikasi variabel, sampel, populasi, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan data primer yang berupa kuesioner. Sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Pengukuran data menggunakan metode analisis dengan software SmartPls 0,3.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran responden serta objek yang diteliti seperti sistem *e-village budgeting*, *good government governance*, dan kompetensi berdasarkan perolehan data. Penjelasan mengenai hasil pengolahan data statistik yang telah dilakukan setelah dilakukannya penelitian. Pada bab ini juga akan membahas evaluasi hasil dari pengolahan data yang dikaitkan dengan hipotesis yang telah dijelaskan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan dari sistem *e-village budgeting* terhadap *good government governance* dengan kompetensi sebagai variabel *intervening*.